



SERTIFIKAT

diberikan kepada:

Risni Julaelni Yuhan

Atas partisipasinya sebagai **PEMAKALAH**, dalam kegiatan Seminar Nasional Official Statistics 2019 dengan makalah berjudul
INDEKS KERAWANAN SOSIAL EKONOMI PEREMPUAN INDONESIA TAHUN 2017

24 September 2019, Politeknik Statistika STIS

Direktur POLSTAT STIS

Dr. Erni Tri Astuti, M.Math
NIP. 1967102211990032002

Ketua Panitia SEMNAS 2019

Dr. Ernawati Pasaribu, S.Si, ME
NIP.197310231995122001

Indeks Kerawanan Sosial Ekonomi Perempuan Indonesia Tahun 2017

(*Indonesian Women Social Economic Vulnerability Index 2017*)

Meylinda Halimah Putri¹, Risni Julaeni Yuhan²

¹Politeknik Statistika STIS

²Politeknik Statistika STIS

Jalan Otto Iskandardinata No.64C, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta

E-mail: dmeylinda57@gmail.com

Abstrak

Keterbatasan perempuan dalam mengakses hal-hal yang dapat menunjang hidupnya disebut sebagai kerawanan. Salah satu bentuk kerawanan yang memicu ketimpangan adalah kerawanan sosial ekonomi perempuan. Sayangnya, sampai saat ini, belum ada ukuran yang menyatakan seberapa besar kerawanan sosial ekonomi perempuan yang terjadi di Indonesia dan apa yang mempengaruhinya. Penelitian ini bertujuan untuk membentuk indeks kerawanan sosial ekonomi perempuan (IKSEP) dan mengetahui variabel-variabel yang mempengaruhi IKSEP pada provinsi di Indonesia. Metode yang digunakan untuk membentuk IKSEP adalah dengan desain hierarki dan agregasi menggunakan fungsi matematis, serta analisis variabel yang mempengaruhi IKSEP menggunakan analisis regresi logistik ordinal. Nilai IKSEP Indonesia berada dalam kategori tinggi. Nilai tersebut berarti bahwa perempuan di Indonesia mengalami pembatasan dan dapat membuat perempuan menjadi tidak berdaya atau mengalami ketimpangan serius. Persebaran nilai IKSEP pun tidak merata di Indonesia. Terdapat 12 provinsi dengan nilai IKSEP tinggi, 13 provinsi dengan IKSEP rendah, dan 9 provinsi dengan IKSEP sedang. Variabel IPG dan realisasi anggaran KPPPA signifikan memengaruhi IKSEP. IKSEP yang didapat dari penelitian ini diharapkan dapat memudahkan para pengambil kebijakan dalam penanggulangan kerawanan sosial ekonomi perempuan di tiap provinsi dengan mengetahui dimensi mana yang harus diperbaiki.

Kata kunci—kerawanan sosial ekonomi perempuan, indeks, regresi logistik ordinal

Abstract

The limitations of women in accessing things that can support their lives are known as vulnerability. One form of vulnerability that triggers inequality is the socio-economic vulnerability of women. Until now, there is no measurement that shows socio-economic vulnerability of women in Indonesia and what affects it. This study aimed to establish a socio-economic vulnerability index for women (IKSEP) and identify the variables that affect the IKSEP in provinces in Indonesia. The method used to construct IKSEP was hierarchical design and aggregation using mathematical functions, and analysis of variables that affect IKSEP using ordinal logistic regression. The value of Indonesian IKSEP is in the high category. It means that women in Indonesia have limitation and could made women truly helpless or experiencing serious inequality. The IKSEP values is not evenly distributed in Indonesia. There are 12 provinces with high IKSEP values, 13 provinces with low IKSEP, and 9 provinces with moderate IKSEP. The IPG and KPPPA's budget realisation variables significantly influence IKSEP. The IKSEP obtained from this study was expected to help policy makers in overcoming women's socio-economic vulnerability in each province by knowing which dimensions should be improved.

Keywords—women socio-economic vulnerability, index, ordinal logistic regression

PENDAHULUAN

Salah satu target dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) poin lima (Kesetaraan Gender) adalah mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun (UNDP, 2017). Indonesia juga berkomitmen untuk mencapai target internasional tersebut pada tahun 2030 yang akan datang. Pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN), ada target peningkatan kualitas hidup perempuan. Terlihat keinginan pemerintah untuk mengatasi ketimpangan gender serta kerawanan yang dialami oleh perempuan Indonesia. Ketimpangan gender berawal dari kerawanan yang terjadi pada perempuan (Fineman, 2017). Perempuan menjadi kelompok yang rawan karena kurangnya akses sumber daya yang ada. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia tahun 2017 mencapai angka 0,453 lebih tinggi dibandingkan IKG dunia (0,441). Angka tersebut mengindikasikan adanya kerugian/kegagalan pencapaian pembangun manusia akibat adanya ketidaksetaraan gender terkait kualitas hidup dan pemberdayaan. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan gender, dapat dilakukan penanggulangan melalui akarnya terlebih dahulu, yaitu kerawanan.

Saat ini belum ada suatu ukuran pasti yang dapat menunjukkan seberapa besar kerawanan sosial dan ekonomi perempuan di Indonesia. Padahal dengan adanya ukuran tersebut akan memudahkan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan untuk kesetaraan gender. Dengan ukuran ini mempermudah pengguna data untuk mendapatkan gambaran umum mengenai isu kerawanan dan dapat dimonitor dari waktu ke waktu atau pada satu waktu dan memonitor keadaan antar wilayah. Berdasarkan penjelasan di atas, maka tujuan penelitian ini akan membentuk indeks kerawanan sosial ekonomi perempuan (IKSEP) pada provinsi di Indonesia dan mengetahui variabel-variabel yang memengaruhinya.

Penelitian sebelumnya yang juga membentuk indeks kerawanan perempuan adalah penelitian dari Amin dkk tahun 2013 di Uganda yang berhasil membentuk *Adolescent Girls Vulnerability Index* (AGI). Indeks tersebut bertujuan untuk membuat indikator yang bisa menggambarkan keadaan kerawanan remaja perempuan di Uganda bagi para pembuat kebijakan dan investor dalam aspek sosial dan ekonomi. Penelitian terkait pembuatan indeks kerawanan sosial ekonomi perempuan belum ditemukan di Indonesia, hanya sekedar mendeskripsikan bagaimana kerawanan yang terjadi. Berdasarkan penjelasan di atas, maka tujuan penelitian ini akan membentuk indeks kerawanan sosial ekonomi perempuan pada provinsi di Indonesia dan mengetahui variabel-variabel yang mempengaruhi indeks kerawanan sosial ekonomi perempuan pada provinsi di Indonesia. Adanya indeks kerawanan sosial ekonomi perempuan ini diharapkan dapat memudahkan para pengambil kebijakan dalam penanggulangan masalah perempuan Indonesia untuk memahami masalah kerawanan sosial ekonomi perempuan.

METODE

Pembentukan Indeks

Indeks adalah sebuah besaran kuantitatif yang dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan untuk melakukan perbandingan antara kegiatan yang sama dalam dua waktu yang berbeda (Supranto, 2000). Saltelli menyatakan bahwa lebih mudah untuk publik menginterpretasikan indeks komposit dibandingkan dengan mengidentifikasi tren di beberapa indikator, dan juga terbukti berguna untuk menjadi standar performa suatu negara (Saltelli, 2007). Tidak ada metode universal untuk pembentukan indeks komposit. Pemilihan metode terbaik untuk membentuk indeks komposit dapat dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor seperti tipe indikator, tipe agregasi, tipe komparasi dan tipe penimbang. Tidak ada susunan yang baku dalam pemilihan metode ini sehingga ada beberapa langkah yang dapat dihilangkan untuk memenuhi langkah yang lain (Mazziotta & Pareto, 2013).

Dalam penelitian ini, desain struktural yang digunakan adalah desain hierarki, dengan menggunakan alur desain pemilihan metode pembentukan indeks menurut Mazziotta dan Pareto. Indeks yang akan dibentuk terdiri atas indikator yang bertipe tidak dapat disubstitusi sehingga metode agregasi yang digunakan adalah non-kompensatori dan diagregasikan dengan simpel menggunakan fungsi matematika sederhana yaitu rata-rata geometrik. Kemudian, tipe komparasi yang dipilih adalah absolut yang melihat nilai dasar (acuan) dari setiap indikator yang ada. Bobot yang digunakan adalah pembobotan secara subjektif, dengan memberikan bobot yang sama untuk setiap indikator, karenanya metode normalisasi yang dilakukan adalah transformasi min-max. Angka indeks terakhir diagregasi menggunakan rata-rata geometrik. Hasil angka indeks yang didapat ketika

bernilai 1 berarti kerawanan maksimum dan bernilai 0 berarti kerawanan minimum (Venkatesan & Ahmed, 2017).

Kategorisasi dilakukan untuk kesederhanaan serta kemudahan mengkomunikasikan hasil analisis kepada pembaca (Iacobucci, Posavac, Kardes, Schneider, & Popovich, 2015). Dalam penelitian ini, kategorisasi dilakukan dengan menggunakan *interquartile range* (IQR). Kategorisasi menggunakan IQR menjadi 3 kelas dapat digunakan untuk data yang berdistribusi asimetris dan terdapat outlier (Helena, João, & Gageiro, 2016).

$$\text{Indeks} \begin{cases} \text{Rendah, Indeks} \leq \text{Median} - 0,25 \text{ IQR} \\ \text{Sedang, Median} - 0,25\text{IQR} < \text{Indeks} < \text{Median} + 0,25\text{IQR} \\ \text{Tinggi, Indeks} \geq \text{Median} + 0,25\text{IQR} \end{cases} \quad (1)$$

Regresi Ordinal

Regresi logistik ordinal adalah model logistik standar yang diperluas untuk bisa digunakan untuk variabel dependen yang memiliki dua atau lebih kategori yang terurut (jenis data ordinal) (Kleinbaum & Klein, 2010). Model yang umum digunakan dalam regresi logistik ordinal adalah model *proportional odds* atau disebut juga *cumulative logit model*. Asumsi yang ada dalam model ini adalah nilai *odds ratio* yang digunakan akan sama untuk melihat efek keterpaparan variabel untuk setiap komparasi yang ada pada titik potong mana saja. Maka, jika ada G kategori hasil, hanya akan ada 1 parameter untuk setiap variabel penjelas dan nilai intersept yang berbeda untuk setiap perbandingan G-1. Pada analisis menggunakan regresi logistik ordinal, ada empat tahapan pengujian signifikansi parameter yaitu, uji asumsi kesejajaran garis, uji kebaikan model, uji simultan, dan uji parsial. Kemudian dilakukan analisis dan interpretasi pada model yang sudah didapat.

Indeks Kerawanan Sosial Ekonomi Perempuan (IKSEP)

UNISDR dalam kajiannya pada tahun 2013 yang membahas mengenai kerawanan menyatakan bahwa kerawanan sosial adalah kerawanan yang berasal dari relasi sosial, institusi, dan sistem nilai-nilai budaya (UNISDR, 2013). Dalam penelitian ini konsep kerawanan sosial ekonomi yang dipakai adalah keadaan yang merugikan saat suatu kelompok aksesnya terbatas terhadap sumber daya sosial dan ekonomi. Hal ini akan membuat masalah sosial di masyarakat yang dibentuk oleh hubungan sosial antar individu di dalamnya.

Kerawanan sosial ekonomi perempuan adalah kondisi saat perempuan dirugikan karena aksesnya terbatas terhadap sumber daya sosial dan ekonomi. Kemos RI mendefinisikan PRSE sebagai seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Namun, belum ada ukuran untuk mengukur fenomena ini, karenanya dibentuklah IKSEP untuk memahami bagaimana fenomena ini terjadi. IKSEP adalah ukuran kerawanan sosial ekonomi perempuan yang memperlihatkan keterbatasan akses perempuan kepada dimensi perlindungan, pendidikan, kesehatan, dan kemiskinan.

Indeks kerawanan yang berkaitan dengan keadaan sosial dan ekonomi perempuan terbaru adalah indeks kerawanan gender yang dibuat oleh Plan India. Plan India membuat laporan yang berjudul *Gender Vulnerability Index Report – I* yang menghasilkan GVI (*Gender Vulnerability Index*). Ukuran tersebut memastikan bagaimana kerawanan yang dihadapi oleh anak perempuan dan perempuan di India dalam pendekatan siklus hidup (*the Lifecycle Approach*). Pendekatan ini digunakan untuk mendefinisikan kerawanan karena dianggap dapat mengabungkan isu dan tantangan yang dihadapi oleh perempuan selama siklus hidupnya.

Dimensi yang digunakan Plan India (2017) dalam menyusun indeks kerawanan perempuan adalah:

1. Perlindungan

Perempuan selama ini dianggap sebagai beban di dalam keluarga, sehingga sering terdiskriminasi oleh laki-laki dalam keluarga tersebut. Selain itu, masih adanya norma-norma adat yang masih bersifat patriaki membuat perempuan semakin rawan keadaannya. Perempuan selalu dibatasi oleh adat untuk akses-akses yang berkaitan dengan hidupnya, seperti makan, pendidikan, dan pernikahan usia remaja yang diatur oleh keluarga. Perlindungan merupakan hak yang harus dipenuhi terkhusus lagi bagi kelompok perempuan. Indikator pada dimensi perlindungan adalah rasio jenis kelamin dari total populasi, persentase kriminalitas pada perempuan, dan persentase perempuan usia 20-24 yang menikah sebelum 18 tahun.

2. Pendidikan

Dimensi ini dimasukkan karena perempuan seharusnya memiliki ekosistem yang cukup dan sehat untuk mencapai potensi terbaiknya. Pendidikan perempuan adalah investasi yang baik untuk masa depan yang akan membawa kontribusi ekonomi yang lebih baik hingga kesehatan generasi yang akan datang, karena pendidikan akan berefek pada dimensi kehidupan perempuan lainnya, seperti pekerjaan. Indikator pada dimensi pendidikan adalah persentase murid perempuan di SD-SMA, angka partisipasi sekolah (APS) perempuan usia 7-12 tahun, APS perempuan 13-15 tahun, APS perempuan 16-18 tahun, rasio murid guru SD, rasio murid guru SMP, rasio murid guru SMA, dan angka melek huruf perempuan.

3. Kesehatan

Penting bagi perempuan dan lingkungannya untuk menjaga kesehatannya. Saat ini banyak perhatian yang diberikan oleh pemerintah dan organisasi internasional untuk kesehatan ibu dan anak. Walaupun kenyataannya, saat ini masih terdapat keterbatasan akses kesehatan yang membuat perempuan tidak memiliki nutrisi yang cukup untuk dirinya serta adanya perempuan yang melakukan tindakan yang membahayakan kesehatannya sendiri. Perempuan harus terus diberikan perhatian yang besar dalam bidang kesehatan di setiap tahapan hidupnya. Indikator pada dimensi kesehatan adalah persentase perempuan yang mendapatkan Jaminan Kesehatan, persentase perempuan bukan peserta KB yang dikunjungi petugas lapangan KB dan diskusi tentang KB, persentase penduduk yang merokok, persentase partisipasi KB, persentase pemeriksaan kehamilan minimal 4 kali, persentase melahirkan ditolong petugas kesehatan, dan persentase remaja putri mendapat TTD (Tablet Tambah Darah).

4. Kemiskinan

Beban dari kemiskinan utamanya dibawa oleh perempuan, dimana ia akan cenderung kehilangan hak dan harga dirinya karena kemiskinan dan ketidaksetaraan. Perempuan semestinya mendapatkan akses yang sama dengan laki-laki untuk bekerja produktif sampai dengan memiliki tabungan untuk diri sendiri. Oleh karena itu, semakin banyak perempuan yang miskin, maka dapat dikatakan perempuan di daerah tersebut semakin rawan. Kerawanan gender dalam dimensi ini dapat dikurangi dengan memberikan kapasitas dan pilihan untuk berpartisipasi dalam tenaga kerja dan pengambilan keputusan ekonomi. Indikator pada dimensi kemiskinan adalah persentase RuTa tidak memiliki fasilitas BAB, persentase RuTa yang menggunakan listrik, tingkat pengangguran terbuka perempuan (TPT), persentase perempuan yang tidak memiliki rumah milik sendiri-bersama, persentase perempuan yang tidak mengambil keputusan dalam RuTa, dan persentase perempuan yang tidak memiliki kontrol atas pendapatannya (Plan India, 2017).

Penghitungan GVI dimulai dengan menormalisasi nilai dari setiap indikator dengan menggunakan persamaan (2) dan (3). Kemudian dilakukan penghitungan rata-rata dari nilai yang telah dinormalisasi untuk setiap dimensi pada setiap negara bagian seperti pada persamaan (4). Setelah didapat nilai dimensi maka dihitung nilai GVI dengan menggunakan rata-rata harmonik. Pada tahap akhir, nilai GVI dan nilai indeks pada tiap dimensi pada setiap negara bagian diurutkan dengan menggunakan ranking secara statistik. Plan memiliki keterbatasan pada konsep kerawanan yang digunakan, dimana ia melihatnya sebagai karakteristik alami dari perempuan, sehingga tidak dapat membuat perbandingan dengan laki-laki. IKSEP mengikuti konsep yang sama dalam kerangka pikir seperti GVI dalam pembentukan indeksnya dan indikator yang disebutkan sebelumnya. Perbedaan terdapat pada agregasi indeks akhir, pada penelitian ini metode yang digunakan adalah rata-rata geometrik seperti pada persamaan (5).

$$x_{ij} = \frac{x_{ij} - \text{Min}(X_{ij})}{\text{Max}(X_{ij}) - \text{Min}(X_{ij})} \dots\dots\dots (2)$$

$$y_{ij} = \frac{\text{Max}(Y_{ij}) - y_{ij}}{\text{Max}(Y_{ij}) - \text{Min}(Y_{ij})} \dots\dots\dots (3)$$

$$I_{\text{dimensi a}} = \frac{\sum_{i=1}^n x_{\text{dimensi a}}}{n} \dots\dots\dots (4)$$

$$\text{Indeks akhir} = \left(\prod_{a=1}^k I_{\text{dimensi a}} \right)^{\frac{1}{k}} \dots\dots\dots (5)$$

dimana:

x_{ij} / y_{ij} = nilai indikator daerah i dari indikator j

a = nilai dimensi ke a

Penelitian ini menggunakan data sekunder tahun 2017 dengan sumber data melalui publikasi-publikasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Badan Pusat Statistik (BPS) serta website BPS.

Variabel yang Memengaruhi Kerawanan Sosial Ekonomi Perempuan

1. Penduduk Miskin

Kemiskinan berpengaruh kepada kerawanan sosial ekonomi perempuan karena kemiskinan membuat perempuan menjadi semakin memiliki akses yang terbatas terhadap sumber daya. Perempuan dalam kelompok pendapatan rendah lebih sulit untuk keluar dari kemiskinan karena keterbatasan akses terhadap pekerjaan dengan upah yang layak, pinjaman untuk memulai bisnis, dan pelatihan (Livingstone & Chagnon, 2004).

2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Pembangunan gender berpengaruh pada kerawanan sosial dalam hal bagaimana ia dapat memperlihatkan bagaimana akses yang didapat oleh perempuan untuk fasilitas-fasilitas pembangunan yang disediakan untuk pembangunan. Pada IPG dapat dilihat bagaimana perempuan dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendidikan.

3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Keberdayaan berkaitan dengan kerawanan ketika dilihat dari bagaimana kemampuan perempuan dalam lingkungannya. Ketika perempuan tidak berdaya, yang diperlihatkan dengan kondisi perempuan dimana ia tidak memiliki kemampuan baik sosial maupun ekonomi. Pemberdayaan seperti membangkitkan aktivitas yang dapat menambah penghasilan, akan mampu membuat perempuan berdaya secara sosial dan ekonomi. Hal inilah yang meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial perempuan dimana ia akan mendapatkan kembali hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh perempuan seperti hak kepemilikan, tenaga kerja, dan tidak mengalami diskriminasi.

4. Realisasi Anggaran KPPPA

Mewujudkan anggaran untuk KPPPA sesuai dengan fungsinya adalah salah satu cara untuk mengurangi kerawanan perempuan di masyarakat. Dalam realisasi anggaran KPPPA, dilihat bagaimana rasio efektivitas anggarannya. Rasio efektivitas inilah yang akan mencerminkan kemampuan satuan kerja di daerah dalam merealisasikan anggaran belanja yang direncanakan dibandingkan dengan target anggaran yang diusulkan (Saputra, 2014). Ketika rasio efektivitas bernilai semakin besar (mendekati 100 persen) maka dapat dinyatakan bahwa kemampuan satuan kerja tersebut semakin baik dalam melakukan kegiatan pengurangan kerawanan sosial ekonomi perempuan di provinsi tersebut. Hal ini terjadi karena KPPPA adalah kementerian yang memiliki berbagai program yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, seperti perlindungan dan pemberdayaan perempuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indeks Kerawanan Sosial Ekonomi Perempuan (IKSEP)

IKSEP adalah sebuah indeks yang menjadi ukuran kerawanan sosial ekonomi perempuan yang memperlihatkan keterbatasan akses perempuan kepada dimensi perlindungan, pendidikan,

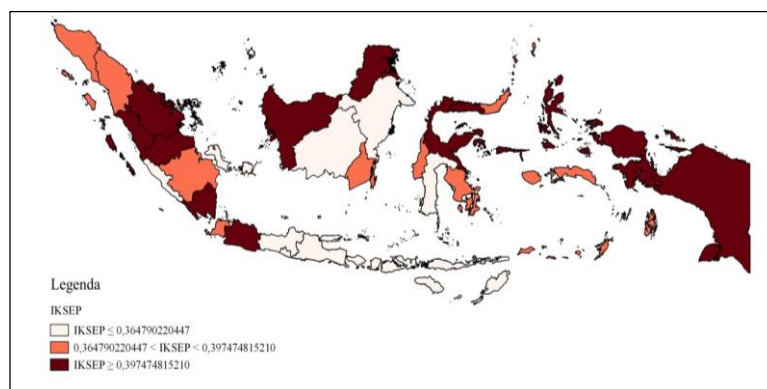
kesehatan, dan kemiskinan. IKSEP memiliki empat dimensi yang menjadi pembentuknya yaitu dimensi perlindungan, pendidikan, kesehatan, dan kemiskinan. Indikator-indikator pada tiap dimensi dibuat menjadi indeks dimensi yang kemudian diagregasikan menjadi IKSEP. IKSEP dihitung menggunakan persamaan berikut:

$$IKSEP = (I_{\text{Perlindungan}} \times I_{\text{Pendidikan}} \times I_{\text{Kesehatan}} \times I_{\text{Kemiskinan}})^{\frac{1}{4}} \quad (6)$$

Dimana I berarti indeks dari dimensi pembentuk. IKSEP dihasilkan untuk tingkat provinsi dan nasional, dan dibagi menjadi tiga kategori kelompok yaitu IKSEP rendah, IKSEP sedang, dan IKSEP tinggi dengan pengkategorian seperti Persamaan (1). Pada tiap dimensi, nilai indeks dimensi yang dihasilkan memiliki sebaran dari angka 0,20 hingga 0,85. Namun, nilai IKSEP yang dihasilkan memiliki nilai minimum pada angka 0,20 dan nilai maksimum pada angka 0,70. Semakin besar nilai IKSEP maka semakin tinggi kerawanan sosial ekonomi perempuan yang terjadi pada provinsi tersebut, dan sebaliknya.

IKSEP Indonesia bernilai 0,399 dan berada pada kelompok IKSEP tinggi, yang berarti bahwa di Indonesia secara nasional kerawanan yang dialami perempuan berada pada posisi tertinggi yang membahayakan perempuan ketika ada guncangan tertentu. Guncangan yang dimaksud adalah pembatasan-pembatasan sosial dan ekonomi yang dilakukan oleh lingkungan kepada perempuan. Indonesia yang masuk pada kelompok IKSEP tinggi, menunjukkan bahwa pembatasan pada perempuan di Indonesia dapat membuat perempuan menjadi tidak berdaya atau mengalami ketimpangan serius. Keadaan ini sesuai dengan kajian dari BPS (2018) yang menyatakan bahwa keadaan ketimpangan gender yang terjadi di Indonesia masih menunjukkan kesenjangan peran yang cukup signifikan dalam pembangunan. Kajian tersebut menunjukkan bahwa di tahun 2017 Indonesia terdapat 44,5 persen kerugian pencapaian pembangunan manusia dalam hal kualitas hidup dan pemberdayaan karena ketimpangan antara laki-laki dan perempuan.

Jika dilihat dari radar plot yang dibuat, Indonesia memiliki masalah pada dimensi kesehatan, dimana dimensi tersebut bernilai 0,54 saat dimensi lain bernilai berada di antara 0,30 – 0,40. Nilai indeks dimensi yang besar tersebut mengidentifikasi bahwa pada dimensi kesehatan masih terdapat keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan oleh perempuan-perempuan di Indonesia. Dimensi lain yang angkanya juga cukup tinggi adalah dimensi perlindungan yang bernilai 0,47. Nilai yang cukup tinggi dapat mengindikasikan bahwa perempuan pun masih kesulitan dalam mendapatkan akses perlindungan di Indonesia. Sementara pada dimensi kemiskinan dan pendidikan yang masing-masing bernilai 0,31 dan 0,32 mengindikasikan bahwa akses perempuan untuk dua dimensi ini sudah cukup baik. Perempuan sudah mampu keluar dari lingkaran kemiskinan dan akses pendidikan sudah cukup merata.



Gambar 1. Peta Tematik Persebaran IKSEP

Dapat dilihat dari Gambar 1 persebaran nilai IKSEP tidak merata di seluruh bagian Indonesia. Kelompok yang memiliki anggota terbanyak adalah kelompok IKSEP tinggi (12 provinsi), kedua kelompok IKSEP rendah (13 provinsi), dan ketiga kelompok IKSEP sedang (9 provinsi). Kelompok

IKSEP tinggi banyak terdapat pada Indonesia Timur. Namun terdapat provinsi-provinsi lainnya yang masuk ke dalam kelompok ini, yaitu Sumatera Barat, Riau, Jambi, Lampung, Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Utara. Nilai tertinggi pada kelompok ini dimiliki oleh Papua sebesar 0,706 dan terendah oleh Kalimantan Barat sebesar 0,458. IKSEP tinggi mencerminkan bahwa terjadi pembatasan akses yang besar pada perempuan di wilayah-wilayah tersebut pada dimensi perlindungan, pendidikan, kesehatan, dan kemiskinan.

Sementara kelompok IKSEP rendah, terdapat provinsi-provinsi seperti D.K.I. Jakarta, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Provinsi tersebut memiliki kerawanan yang rendah mungkin dikarenakan pembangunan daerahnya sudah cukup baik. Pada kelompok ini, provinsi dengan IKSEP tertinggi adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan angka 0,363 dan terendah adalah Provinsi Bengkulu dengan angka 0,292. IKSEP rendah mencerminkan bahwa terjadi pembatasan yang sedikit pada perempuan di wilayah-wilayah tersebut pada dimensi perlindungan, pendidikan, kesehatan, dan kemiskinan. Dimensi perlindungan dan kesehatan yang masih cukup tinggi angkanya mengindikasikan bahwa akses pada kedua dimensi tersebut masih terbatas untuk perempuan-perempuan yang tinggal di provinsi dalam lingkungan ini, walaupun secara keseluruhan kerawanan yang dialaminya masih terbilang rendah.

Pada kelompok IKSEP sedang, terdapat provinsi-provinsi seperti Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Selatan. Provinsi tersebut mengalami kerawanan yang sedang mungkin dikarenakan termasuk dalam wilayah yang tengah aktif membangun fasilitas-fasilitas di dalamnya. Provinsi dengan IKSEP sedang tertinggi adalah Sumatera Utara dengan nilai sebesar 0,397 dan yang terendah adalah Aceh dengan nilai sebesar 0,367. IKSEP sedang mencerminkan bahwa terjadi pembatasan yang cukup banyak pada perempuan di wilayah-wilayah tersebut pada dimensi perlindungan, pendidikan, kesehatan, dan kemiskinan. Pada kelompok IKSEP sedang, akses yang paling terbatas bagi perempuan adalah akses terhadap perlindungan. Sementara pada dimensi kesehatan, nilai yang cukup tinggi menunjukkan bahwa perempuan pada kelompok ini masih mengalami keterbatasan akses pada bidang kesehatan.

Variabel yang Memengaruhi IKSEP

Variabel-variabel yang dilihat pengaruhnya terhadap IKSEP adalah persentase penduduk miskin, IPG, IDG, dan realisasi anggaran KPPPA. Secara deskriptif, hubungan keempat variabel tersebut dengan nilai IKSEP provinsi menunjukkan kesesuaian dengan teori yang dinyatakan sebelumnya.

Pada variabel persentase penduduk miskin, kesesuaian dengan teori diperlihatkan oleh kuadran 1 dan 3, pada kuadran 1 menunjukkan wilayah dengan penduduk miskin tinggi memiliki IKSEP yang tinggi dan kuadran 3 menunjukkan wilayah dengan penduduk miskin yang rendah nilai IKSEP-nya pun dalam sebaran nilai yang rendah hingga sedang. Namun, pada variabel persentase penduduk miskin, ditemui lima wilayah dengan penduduk miskin tinggi namun memiliki IKSEP yang rendah hingga sedang, yaitu Aceh, Bengkulu, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Fenomena ini mungkin dikarenakan perempuan pada provinsi tersebut tidak terlalu dibatasi dalam mengakses kehidupan sosial dan ekonominya, walaupun memiliki penduduk miskin yang lebih tinggi dibandingkan provinsi lain. Dapat dilihat dari tingginya persentase perempuan bekerja sebagai tenaga profesional (Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi, Teknisi) pada provinsi-provinsi tersebut.

Pada variabel IPG, terdapat kesesuaian antara hasil dan teori bahwa pembangunan gender yang baik akan menurunkan kerawanan perempuan dan atau sebaliknya. Hal ini dapat dilihat dari kuadran 2 dan 4. Hal ini dapat terjadi karena pada provinsi yang memiliki nilai IPG lebih dari atau sama dengan IPG nasional cenderung akan memberikan akses yang lebih bagi perempuan pada bidang pendidikan, kesehatan, serta daya beli, yang tentu akan membuat perempuan di daerah tersebut cenderung untuk tidak rawan, karena tidak mengalami pembatasan akses atas hak-hak dasarnya tersebut.

Pada variabel IDG, kebanyakan provinsi berada pada kuadran 3 serta 4. Kuadran 3 berarti bahwa ia memiliki nilai IDG rendah hingga sedang dan memiliki IKSEP yang rendah hingga sedang juga. Sementara kuadran 4 adalah wilayah dengan IDG tinggi namun memiliki nilai IKSEP rendah hingga sedang. Hal ini dapat dijelaskan melalui kenyataan bahwa IDG melihat bagaimana partisipasi perempuan dalam ekonomi dan politik, dimana semakin baik nilai IDG di provinsi tersebut maka IKSEP akan cenderung bernilai sedang-rendah saja.

Pada variabel realisasi anggaran KPPPA, dapat dilihat bahwa 23 provinsi berada pada kuadran 4, yang berarti realisasi anggaran tinggi dan IKSEP rendah hingga sedang. Hal ini menyatakan bahwa satuan kerja KPPPA di provinsi tersebut telah berhasil merealisasikan anggaran dengan baik, sehingga dianggap dapat membuat kerawanan perempuan yang rendah hingga sedang di provinsi tersebut.

Analisis yang dilakukan menggunakan regresi logistik ordinal pada persentase penduduk miskin, IPG, IDG, dan realisasi anggaran KPPPA, dengan IKSEP dengan tiga kategori, IKSEP Rendah (1), Sedang (2), dan Tinggi (3). Dua model yang dihasilkan adalah sebagai berikut.

$$\text{Logit}[P(Y \leq 2)] = 1,644 + 0,199\text{Miskin} + 1,789\text{IPG}_2 + 0,548\text{IDG}_2 + 2,003\text{Realisasi}_2 \quad (7)$$

$$\text{Logit}[P(Y \leq 3)] = 3,130 + 0,199\text{Miskin} + 1,789\text{IPG}_2 + 0,548\text{IDG}_2 + 2,003\text{Realisasi}_2 \quad (8)$$

Model ini telah memenuhi asumsi *parallel lines* dan kesesuaian model dengan tingkat signifikansi 5 persen. Hal ini berarti bahwa asumsi *parallel lines* terpenuhi dalam model yang diajukan. Oleh karena itu, model *proportional odds* dapat digunakan serta model dan data yang digunakan cocok. Secara simultan menggunakan model yang ada, dengan tingkat signifikansi 5 persen, terdapat pengaruh dari persentase penduduk miskin, IPG, IDG, dan realisasi anggaran KPPPA yang digunakan pada IKSEP. Namun, secara parsial, hanya variabel IPG dan realisasi anggaran KPPPA yang signifikan berpengaruh pada IKSEP.

Interpretasi nilai *odds ratio* akan sama pada kedua model yang terbentuk, hanya perbandingan kategori IKSEP-nya saja yang berbeda. Pada interpretasi nilai *odds ratio* model $\text{Logit}[P(Y \leq 2)]$ maka akan diperlihatkan kecenderungan suatu provinsi untuk mendapat nilai IKSEP dengan kategori sedang dibanding mendapat nilai IKSEP kategori rendah. Sementara interpretasi nilai *odds ratio* model $\text{Logit}[P(Y \leq 3)]$ maka akan diperlihatkan kecenderungan suatu provinsi untuk mendapat nilai IKSEP dengan kategori tinggi dibanding mendapat nilai IKSEP kategori sedang atau rendah. Berikut ini adalah interpretasi *odds ratio* dari model $\text{Logit}[P(Y \leq 2)]$:

1. Persentase Penduduk Miskin

Kecenderungan provinsi dengan persentase penduduk miskin di atas nilai median untuk mendapat nilai IKSEP dengan kategori sedang dibanding mendapat nilai IKSEP kategori rendah sebesar 1,220 kali lebih besar dibandingkan provinsi dengan persentase penduduk miskin di bawah nilai median ketika variabel lain konstan. Hal ini sesuai dengan penelitian dari Kisanga dan Livingstone & Chagnon yang menyatakan bahwa perempuan yang mengalami atau berada dalam wilayah kemiskinan memiliki kerawanan sosial ekonomi, yaitu terbatasnya akses pada fasilitas sosial dan ekonomi di wilayahnya (Kisanga, 2007; Livingstone & Chagnon, 2004). Walaupun demikian variabel ini secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai IKSEP di provinsi di Indonesia. Hal ini mungkin terjadi karena adanya efek saling balik antara kerawanan dan kemiskinan. Children in Crisis menyatakan bahwa kerawanan dapat membuat perempuan jatuh ke dalam kemiskinan (Children in Crisis, 2017). Sehingga, dalam penelitian ini hasil yang didapat berbeda dari teori awal.

2. IPG

Kecenderungan provinsi dengan nilai IPG di bawah nilai IPG Nasional untuk mendapat nilai IKSEP dengan kategori sedang dibanding mendapat nilai IKSEP kategori rendah sebesar 5,986 kali lebih besar dibandingkan provinsi dengan nilai IPG di bawah nilai IPG Nasional ketika variabel lain konstan. Hal ini sesuai dengan penelitian dari Indraswari dan Kisanga dimana semakin baik pembangunan perempuan maka akan menurunkan kerawanan di daerah tersebut (Indraswari, 2008; Kisanga, 2007). Variabel IPG secara parsial signifikan berpengaruh terhadap nilai IKSEP di provinsi di Indonesia.

3. IDG

Kecenderungan provinsi dengan nilai IDG di bawah nilai rata-rata untuk mendapat nilai IKSEP dengan kategori sedang dibanding mendapat nilai IKSEP kategori rendah sebesar 1,729 kali lebih besar dibandingkan provinsi dengan nilai IDG di atas nilai rata-rata ketika variabel lain konstan. Hal ini sesuai dengan penelitian dari Kisanga dimana semakin baik pemberdayaan perempuan (partisipasi ekonomi dan politik) maka akan menurunkan kerawanan di daerah tersebut (Kisanga, 2007). Variabel ini mungkin tidak berpengaruh pada kerawanan perempuan di Indonesia karena masih belum meratanya pemberdayaan perempuan yang ada di Indonesia. Seperti laporan KPPPA yang menyatakan bahwa pemberdayaan belum tercapai karena belum ada kontribusi yang sama antara laki-laki dan perempuan di bidang politik dan ekonomi (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2018).

4. Realisasi Anggaran KPPPA

Kecenderungan provinsi dengan nilai realisasi anggaran KPPPA di bawah nilai median untuk mendapat nilai IKSEP dengan kategori sedang dibanding mendapat nilai IKSEP kategori rendah sebesar 7,411 kali lebih besar dibandingkan provinsi dengan nilai realisasi anggaran KPPPA di atas nilai rata-rata ketika variabel lain konstan. Variabel realisasi anggaran KPPPA menunjukkan bahwa provinsi dengan nilai realisasi anggaran yang berada di bawah nilai median akan membuat kerawanan semakin tinggi. Hal ini sesuai dengan UNHR dimana pemerintah harus membuat anggaran yang memperhatikan kelompok rawan agar tidak semakin rawan dan mampu mengurangi kerawanan yang dialaminya (United Nation Human Rights, 2017). Realisasi anggaran KPPPA untuk program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang mencapai 96,41 persen pun sesuai dengan penelitian dari Elson yang menyatakan pentingnya realisasi anggaran secara progresif untuk merealisasikan hak perempuan Variabel realisasi anggaran KPPPA secara parsial signifikan berpengaruh terhadap nilai IKSEP di provinsi di Indonesia (Elson, 2006).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Ukuran IKSEP yang terbentuk untuk provinsi-provinsi di Indonesia menunjukkan hasil yang beragam. Nilai IKSEP Nasional adalah 0,399 dan termasuk dalam kelompok IKSEP tinggi. Terdapat 13 provinsi dalam kelompok IKSEP rendah dengan dimensi yang memiliki nilai tertinggi adalah dimensi perlindungan. Kelompok IKSEP sedang memiliki 9 provinsi dengan dimensi yang memiliki nilai tertinggi adalah dimensi kesehatan. Sementara itu, dalam kelompok IKSEP tinggi terdapat 12 provinsi dimana dimensi yang memiliki nilai tertinggi adalah dimensi kemiskinan.
2. Variabel yang signifikan memengaruhi IKSEP adalah IPG dan realisasi anggaran KPPPA, sementara variabel persentase penduduk miskin dan IDG tidak signifikan. Kecenderungan provinsi di Indonesia untuk memiliki IKSEP lebih besar (lebih rawan) adalah ketika provinsi tersebut memiliki nilai IPG di bawah nilai IPG Nasional, memiliki nilai realisasi anggaran KPPPA dibawah median.

Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menambahkan indikator lain, seperti persentase sekolah yang berlistrik, persentase perempuan yang mendapatkan keuntungan dari program kesehatan ibu nasional, persentase perempuan yang memiliki telepon genggam untuk kepentingan pribadi, serta persentase alokasi anggaran untuk keamanan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Children in Crisis. (2017). *An assessment of women's social and economic vulnerabilities*. Retrieved from [https://www.childrenincrisis.org/sites/default/files/inlinefiles/Sinoe Assessment 2017 - web.pdf](https://www.childrenincrisis.org/sites/default/files/inlinefiles/Sinoe%20Assessment%202017%20-%20web.pdf)

Elson, D. (2006). *Budgeting for womens rights: monitoring government budgets for compliance with*

CEDAW.

- Fineman, M. A. (2017). Vulnerability and inevitable inequality. *Oslo Law Review*, 4(03), 133–149.
- Helena, M., João, P., & Gageiro, N. (2016). *Análise de Dados para Ciências Sociais A Complementariedade do SPSS EDIÇÕES SILABO*. Retrieved from www.silabo.pt
- Iacobucci, D., Posavac, S. S., Kardes, F. R., Schneider, M. J., & Popovich, D. L. (2015). The median split: Robust, refined, and revived. *Journal of Consumer Psychology*, 25(4), 690–704.
- Indraswari, I. (2008). Perempuan, Kemiskinan dan Anggaran Pembangunan. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(2).
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2018). *aporan Keuangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia 2017*. Jakarta.
- Kisanga, C. L. (2007). *Women social and economic empowerment-project proposal development: the case study of St. Maria Magdalena Ifakara Women Group*. Southern New Hampshire University.
- Kleinbaum, D. G., & Klein, M. (2010). Ordinal logistic regression. In *Logistic regression* (pp. 463–488). Springer.
- Livingstone, A.-M., & Chagnon, L. (2004). *From Poverty to Empowerment: a research report on women and community economic development (CED) in Canada*. Canadian women's Foundation and Canadian Women's Community Economic
- Mazziotta, M., & Pareto, A. (2013). Methods for constructing composite indices: One for all or all for one. *Rivista Italiana Di Economia Demografia e Statistica*, 67(2), 67–80.
- Plan India. (2017). *The Gender Vulnerability Index*. Retrieved from https://www.planindia.org/sites/all/themes/plan_india/images/pdf/gender-vulnerability-index.pdf
- Saltelli, A. (2007). Composite indicators between analysis and advocacy. *Social Indicators Research*, 81(1), 65–77.
- Saputra, D. (2014). Analisis Kemandirian Dan Efektivitas Keuangan Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Di Propinsi Sumatera Barat. *Jurnal Akuntansi*, 2(1).
- Supranto, J. (2000). *Statistik: Teori dan aplikasi edisi keenam*. Jakarta: Erlangga.
- UNDP. (2017). *Human Development Report 2016 Human Development for Everyone*. Retrieved from United Nation website: <https://doi.org/10.18356/b6186701-en>
- UNISDR. (2013). *Issues of Vulnerability with Specific Reference to Gender in the Asia Pacific*. Jenewa.
- United Nation Human Rights. (2017). *Realizing Human Rights Through Government Budgets*. Newyork, Geneva.
- Venkatesan, S., & Ahmed, M. (2017). Social vulnerability assessment using a statistical approach and United Nations Development Programme (UNDP) scheme. *Australian Journal of Civil Engineering*, 15(2), 103–108. <https://doi.org/10.1080/14488353.2017.1394153>